

**RENCANA TINDAK PRORITAS BIDANG  
POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI**

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI  
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
<b>FOKUS PRIORITAS</b>								
I	PENINGKATAN AKUNTABILITAS LEMBAGA DEMOKRASI	Terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk akuntabilitas peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran parpol, penyelenggara pemilu, dan lembaga penyelenggara negara lainnya, serta terlaksananya pemilu 2014 yang adil dan demokratis  Terwujudnya akuntabilitas OMS	Indeks kinerja lembaga demokrasi (melalui Indeks Demokrasi Indonesia/IDI)  Tingkat kesehatan masyarakat sipil (melalui Indeks Kesehatan Masyarakat Sipil)	52,3 *)	70			618,5
				-	3			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI  
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
<b>KEGIATAN PRIORITAS</b>								
1.1	Fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan	Terlaksananya penyusunan kebijakan, fasilitasi dan dukungan bagi peningkatan peran organisasi politik dan kemasyarakatan	% kemajuan rancangan revisi terbatas UU Parpol Jumlah parpol yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas Jumlah dokumen Indeks Kesehatan Masyarakat Sipil Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas % kemajuan rancangan revisi UU No. 8 tahun 1985 tentang Ormas % kemajuan penyusunan rumusan kebijakan, perbaikan mekanisme dan prosedur penyelenggaraan kebijakan publik yang melibatkan masyarakat	55% - - 580 Ormas, LSM dan LNL 55% -	100% 9 parpol 1 Dokumen <sup>k)</sup> 2580 Ormas, LSM dan LNL <sup>k)</sup> 100% 100%	Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kemendagri (Ditjen Kesbangpol)	184,5

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI  
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
			% kemajuan pengembangan Democracy Trust Fund	-	85%			
			Jumlah laporan fasilitasi pertemuan, forum dan uji publik untuk masukan penyusunan naskah akademis dan draft RPP Insentif Perpajakan.	-	3 laporan (1 <sup>k)</sup> laporan masukan hasil pertemuan/forum, 1 laporan masukan hasil uji publik, dan 1 laporan sosialisasi)			
			% kumulatif provinsi/kabupaten/kota yang mendapatkan sosialisasi dan fasilitasi peningkatan peran FKUB	50%	85%			
			Jumlah dokumen evaluasi UU No 9 Tahun 1961 mengenai Pengumpulan Uang atau Barang	-	2 <sup>k)</sup>			
			Jumlah publikasi <i>best practices</i> dan inovasi praktek demokrasi	-	200 <sup>k)</sup>			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI  
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
			% kumulatif wilayah Indonesia yang mendapatkan fasilitas peningkatan peran forum publik	-	65%			
			Tahapan perumusan kebijakan yang mendorong peran dan keberlanjutan organisasi politik dan kemasyarakatan dan mendorong kerja sama organisasi kemasyarakatan dengan pemda	Kajian PP tentang Partai Lokal di Aceh Permendagri tentang Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing Permendagri tentang Fasilitas Pelayanan dan Pemantauan Tenaga Kerja Orang Asing	PP tentang Partai Lokal di Aceh Permendagri tentang Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing Permendagri tentang Fasilitas Pelayanan dan Pemantauan Tenaga Kerja Orang Asing			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI  
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
				25% pemda bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil	70 % pemda bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil			
				-	PP tentang Bantuan Keuangan Parpol			
				-	Permendagri tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Parpol			
			Tingkat kepuasan pelayanan organisasi kemasyarakatan, termasuk data basenya.	50%	75%			

**SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI**  
**PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI**

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
1.2	Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Terselenggaranya penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi hukum dan penyuluhannya	Tingkat ketepatan penyiapan analisis dan masukan rancangan verifikasi peraturan parpol, perseorangan peserta pemilu dan dana kampanye peserta pemilu, penyusunan dapil, dll	60%	85%	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	111,0
			Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan regulasi penyelenggaraan pemilu 2014	-	85%			
			Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan tata cara dan pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa hukum	60%	90%			
			Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum, peraturan perundangan, dan pelaksanaan penyuluhan hukum	60%	90%			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI  
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
1.3	Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan pra sarana pemilu	Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan pra sarana serta terpenuhinya logistik keperluan pemilu.	Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan pemilu	-	90%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	150,0
			Tingkat ketepatan pengadaan dan distribusi logistik pemilu	-	100%			
			Tingkat ketepatan standar mutu barang/jasa administrasi pengadaan dan dokumentasi pengadaan kebutuhan pemilu	-	95%			
			% kemajuan penyusunan peta distribusi logistik pemilu	-	100%			
			Tingkat keberhasilan pemeliharaan sarana dan pra sarana pemilu	60%	77,50%			
1.4	Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data	Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	% kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA K/L	60%	77,50%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	173,0
			% fasilitasi kerja sama KPU dengan lembaga lain	60%	77,50%			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI  
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
			% laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	60%	77,50%			
			% kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformas birokrasi dan tata kelola KPU	-	100% (tersusunnya model dan pedoman, serta penerapannya)			
			Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh wilayah Indonesia	-	8 kali <sup>K)</sup>			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI  
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
II	PENINGKATAN IKLIM KONDUSIF BAGI BERKEMBANGNYA KEBEBASAN SIPIL DAN HAK-HAK POLITIK RAKYAT	Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum	Indeks Kebebasan Sipil	75,7 *)	80			670,3
			Indeks Hak-Hak Politik	53 *)	70			
			Tingkat partisipasi pemilih (pemilu dan pemilu kepala daerah)	-	75%			
<b>KEGIATAN PRIORITAS</b>								
2.1	Koordinasi pemantapan demokratisasi dan kelembagaan	Terselenggaranya koordinasi kebijakan pemantapan demokratisasi dan kelembagaan	Jumlah Rapat Koordinasi Pemantapan Demokratisasi dan Kelembagaan	12	60 <sup>k)</sup>	Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	KEMENKO POLHUKAM	39,9
			Jumlah dokumen Indeks Demokrasi Indonesia	-	3 <sup>k)</sup>			
			Jumlah pemantauan dan evaluasi	4	20 <sup>k)</sup>			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI  
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
2.2	Koordinasi pengelolaan pemantapan otonomi khusus	Terselenggaranya koordinasi kebijakan pengelolaan pemantapan otonomi khusus	Jumlah Rapat Koordinasi Otonomi Khusus	12	60 <sup>K)</sup>	Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	KEMENKO POLHUKAM	35,2
			Jumlah pemantauan dan evaluasi	4	20 <sup>K)</sup>			
			Jumlah Rapat Koordinasi Desk Papua	12	60 <sup>K)</sup>			
			Jumlah pemantauan perkembangan sosial politik di Papua	4	20 <sup>K)</sup>			
2.3	Koordinasi penanganan konflik dan kontijensi	Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Penanganan Konflik dan Kontijensi	Jumlah Rapat Koordinasi Penanganan Konflik dan Kontijensi	12	60 <sup>K)</sup>	Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	KEMENKO POLHUKAM	36,1
			Jumlah pemantauan dan evaluasi	4	20 <sup>K)</sup>			
			Jumlah Rapat Koordinasi Desk Aceh	12	60 <sup>K)</sup>			
			Jumlah pemantauan perkembangan sosial politik di NAD	4	20 <sup>K)</sup>			
			Jumlah Rapat Koordinasi Desk Sulteng	12	60 <sup>K)</sup>			
			Jumlah pemantauan dan evaluasi perkembangan sosial politik di Sulteng	4	20 <sup>K)</sup>			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI  
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
2.4	Koordinasi wawasan kebangsaan	Terselenggaranya koordinasi kebijakan wawasan kebangsaan	Jumlah Rapat Koordinasi Wawasan Kebangsaan	12	60 <sup>K)</sup>	Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	KEMENKO POLHUKAM	3,4
			Jumlah pemantauan dan evaluasi	4	20 <sup>K)</sup>			
2.5	Fasilitasi penanganan konflik	Terlaksananya penyusunan kebijakan dan fasilitasi penanganan konflik	% kemajuan penetapan UU Penanganan Konflik	-	100%	Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kemendagri (Ditjen Kesbangpol)	88,1
			% kumulatif provinsi/kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi pembentukan dan fasilitasi pelembagaan penguatan forum dialog penyelesaian konflik	40%	75%			
			Jumlah angkatan aparatur penda yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan manajemen konflik dan negosiasi	8	48 <sup>K)</sup>			
			Jumlah wilayah yang mendapatkan fasilitasi penanganan konflik berkaitan dengan aspek pemerintahan dan keamanan	6 wilayah pasca konflik (NAD, Kalteng, Sulteng, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat)	8 wilayah pasca konflik (NAD, Kalteng, Sulteng, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan NTT)			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI  
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- 16 wilayah rawan konflik</li> <li>- 10 wilayah potensi konflik</li> </ul>			
			Jumlah dokumen laporan situasi daerah	1 laporan puskomin	5 laporan puskomin <sup>k)</sup>			
			Jumlah paket kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dalam penanganan konflik	-	400 paket kerjasama di 33 provinsi <sup>k)</sup>			
2.6	Pengembangan nilai-nilai kebangsaan	Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan	% penyelesaian rumusan kebijakan pengembangan nilai kebangsaan Indonesia yang tepat waktu	-	87%	Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kemendagri (Ditjen Kesbangpol)	50,4
			Jumlah Modul Pengembangan Nilai Kebangsaan	-	4 Modul (3 Modul <sup>k)</sup> Wawasan Kebangsaan, dan 1 Modul Bingkai Kebangsaan)			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI  
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
				-	3 Modul (1 Modul pembauran kebangsaan, 1 modul Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Bangsa, 1 Modul Ketahanan Bangsa)			
				-	3 Modul Bela Negara <sup>k)</sup>			
				-	2 Modul (1 Modul <sup>k)</sup> Pengembangan Nilai-Nilai Pranata Sosial dan 1 Modul Pengembangan Nilai-Nilai Budaya)			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI  
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
			Jumlah forum sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan, aparatur pemerintah	-	85 <sup>k)</sup>			
			Jumlah peserta TOT/peningkatan kapasitas kader pembauran di daerah	-	196 orang dari 28 <sup>k)</sup> provinsi			
2.7	Pembinaan dan pengembangan budaya politik	Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan budaya politik yang berdasarkan pada 4 pilar negara (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI)	% penyusunan rumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan budaya politik yang akuntabel dan tepat waktu	-	90%	Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kemendagri (Ditjen Kesbangpol)	98,1
			% penyusunan rumusan kebijakan pendidikan perdamaian yang akuntabel dan tepat waktu	-	82,50%			
			Jumlah paket kerja sama pembinaan dan pengembangan budaya politik di wilayah miskin, terisolasi, perbatasan dan kaum marginal	-	536 <sup>k)</sup>			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI  
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
			Jumlah paket kerja sama sosialisasi perundang-undangan dan cinta tanah air	-	536 paket <sup>K)</sup> kerjasama di 33 provinsi			
			Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kelompok kerja demokrasi dan pendampingan pusat pendidikan kewarganegaraan	33	33			
			Jumlah akumulasi provinsi yang membangun dan memperkuat pusat pendidikan kewarganegaraan/politik rakyat	-	25			
			Jumlah materi/modul pendidikan politik bagi calon pemilih pemula	3 modul tentang pendidikan politik bagi calon pemilih pemula	15 modul tentang pendidikan politik bagi calon pemilih pemula <sup>K)</sup>			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI  
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
2.8	Lembaga perwakilan dan partisipasi politik	Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik	% penyusunan rumusan kebijakan fasilitasi lembaga perwakilan dan pengembangan partisipasi politik yang akuntabel dan tepat waktu	50%	90%	Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kemendagri (Ditjen Kesbangpol)	68,5
			% penyusunan mekanisme partisipasi politik rakyat dalam keterlibatan penyusunan kebijakan publik dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan tepat waktu	50%	90%			
			% pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja antar pemerintah dengan lembaga perwakilan	50%	90%			
			Jumlah forum komunikasi politik	-	12 <sup>K)</sup>			
			% laporan pemantauan dan pelaporan perkembangan politik yang tepat waktu	75%	95%			
			Jumlah dokumen evaluasi sistem dan pelaksanaan pemilihan umum	1	5 <sup>K)</sup>			
			% kemajuan penetapan rancangan revisi UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	100%	100%			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI  
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
			% kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD	50%	100%			
			% kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD	50%	100%			
			% kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	50%	100%			
			Jumlah paket kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dalam peningkatan partisipasi politik perempuan	-	400 <sup>k)</sup>			
2.9	Penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah	Tersusunnya UU tentang PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan terselenggaranya Pilkada yang efisien.	% revisi terbatas UU 32 tahun 2004 terkait dengan efisiensi pelaksanaan pilkada	100%	100%	Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Kemendagri	3,0
			Jumlah UU tentang PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1UU	1 UU <sup>k)</sup>			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI  
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
2.10	Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih	Terselenggaranya bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih	% pedoman dan petunjuk teknis bimbingan teknis penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu dan akuntabel	60%	77,50%		Komisi Pemilihan Umum (KPU)	247,5
			% pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka PAW anggota DPR, DPD, DPRD dan KPU yang diselesaikan dengan akuntabel dan tepat waktu	60%	77,50%			
			% fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) pemilu kepala daerah untuk KPU prov/kab/kota, PPK, dan PPS yang tepat waktu, sesuai rencana dan efektif	75%	85%			
			% fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) pemilu legislatif dan presiden untuk KPU prov/kab/kota, PPK dan PPS yang tepat waktu sesuai rencana dan efektif	-	85%			
			% kemajuan pengembangan pusat pendidikan pemilih	35%	100%			
			Jumlah modul pendidikan pemilih untuk kelompok perempuan, miskin, cacat, pemilih pemula, lansia	5	25 <sup>ki)</sup>			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI  
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
			Jumlah kerja sama dan kegiatan pendidikan pemilih yang dilaksanakan	-	40 media massa <sup>K)</sup>			
					kerja sama dengan 1000 OMS <sup>K)</sup>			
					40 kegiatan kemasyarakatan <sup>K)</sup>			
			% kemajuan pengembangan media center	60%	80%			
			Jumlah kegiatan pendidikan pemilih bagi caleg perempuan	-	40 <sup>K)</sup>			
			Jumlah kader parpol perempuan yang mendapatkan pendidikan politik	-	500 <sup>K)</sup>			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI  
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
III	PENINGKATAN PERAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Meningkatnya layanan dan akses terhadap informasi publik	% masyarakat pengguna sarana/prasarana komunikasi	50%	80%			956,9
	<b>KEGIATAN PRIORITAS</b>							
3.1	Penyediaan dan pengelolaan informasi	Tersedianya konten informasi publik yang beragam dan berkualitas yang bersifat mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan masyarakat dalam rangka NKRI	Dokumen <i>Grand design</i> pengelolaan konten dan strategi penyebaran informasi Dokumen <i>database</i> nasional, sektoral dan regional mengenai informasi publik % paket konten informasi publik yang siap pakai dan dimanfaatkan oleh penda Jumlah aktivitas untuk peningkatan <i>citizen journalism</i>	- 3 paket 60% 5 kali	1 15 paket <sup>K)</sup> 80% 25 kali <sup>K)</sup>	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	62,7
3.2	Penyebaran/diseminasi informasi publik	Terlaksananya penyebaran/diseminasi informasi publik	Jumlah dokumen <i>Grand Design Media Centre</i> Jumlah <i>media center</i> yang diperkuat di provinsi/kabupaten/kota Jumlah <i>media center</i> lengkap dan berfungsi sesuai standar di provinsi/kabupaten/kota di daerah terluar/terdepan/pasca konflik % jumlah kerja sama dengan lembaga multilateral, bilateral dan regional yang efektif % aktivitas penyebaran informasi publik langsung ke masyarakat sesuai rencana	1 75 bimtek - 65% 60%	1 75 Bimtek dan 60 penguatan <i>media center</i> <sup>K)</sup> 60 <i>media center</i> <sup>K)</sup> 85% 80%	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	87,1

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI  
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
3.3	Pengembangan kebijakan komunikasi nasional	Terselenggaranya pengembangan kebijakan komunikasi nasional	% kebijakan, regulasi dan standarisasi di bidang komunikasi dan informasi publik untuk mendukung masyarakat informasi	70%	90%	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	20,9
			% laporan pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan dan regulasi bidang komunikasi dan informasi yang tepat waktu dan dimanfaatkan oleh pimpinan	65%	85%			
3.4	Peningkatan peran media publik dalam pengembangan komunikasi dan informasi Nasional	Terlaksananya peningkatan peran media publik	Jumlah aktivitas penguatan lembaga/media publik	5 paket	25 paket <sup>K)</sup>	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	69,7
			Jumlah koordinasi dengan lembaga penyiaran publik TVRI, RRI dan LKBN Antara	12 kali	60 kali <sup>K)</sup>			
3.5	Pengembangan kemitraan lembaga komunikasi	Terselenggaranya pengembangan kemitraan lembaga komunikasi	% aktivitas peningkatan peran organisasi kemasyarakatan sebagai penyebar informasi (KIM, media tradisional, media komunitas) di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal yang dilaksanakan tepat waktu	60%	80%	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	297,5
			% aktivitas yang efektif untuk mendorong media literasi	60%	80%			
			% fasilitasi penyebaran informasi publik melalui media kemasyarakatan yang tepat waktu dan akuntabel	70%	90%			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI  
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
3.6	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Komisi Informasi (KI) Pusat	Tersedianya dukungan teknis dan manajemen dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Informasi (KI) Pusat	% pengaduan perselisihan masalah informasi publik yang terselesaikan	70%	90%			34,5
			% lembaga publik yang melaksanakan kode etik keterbukaan informasi publik	70%	90%			
			Jumlah kegiatan pelaksanaan program pengembangan peran Komisi Informasi Pusat	12 paket	60 paket <sup>K)</sup>			
3.7	Penelitian dan pengembangan aplikasi informatika dan informasi publik	Terlaksananya penelitian dan pengembangan aplikasi informatika dan informasi publik	Jumlah karya riset Bidang Aplikasi Informatika dan Informasi Publik	10 paket	50 paket <sup>K)</sup>	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Pengembangan SDM	Kementerian Komunikasi dan Informatika	50,5
			% pemanfaatan karya riset bidang aplikasi informatika dan informasi publik untuk penyusunan kebijakan/regulasi di bidang kominfo	15%	35%			
3.8	Penelitian dan pengembangan literasi dan profesi	Terlaksananya penelitian dan pengembangan literasi dan profesi	Jumlah karya riset Bidang Literasi dan Profesi	10	50 <sup>K)</sup>	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Pengembangan SDM	Kementerian Komunikasi dan Informatika	331,8
			% pemanfaatan karya riset bidang literasi dan profesi untuk penyusunan kebijakan/regulasi di bidang kominfo	15%	35%			
			Jumlah peserta Bimtek CIO	524	2524 <sup>K)</sup>			
			Jumlah peserta Bimtek Budaya dokumentasi	1048	3048 <sup>K)</sup>			
			Jumlah peserta pelatihan komunikasi publik	1025	3025 <sup>K)</sup>			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI  
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar) <sup>1)</sup>
				2010	2014			
			Jumlah penerima beasiswa S2/S3 dalam dan luar negeri	198	1398 <sup>k)</sup>			
			Jumlah paket standar kompetensi kerja bidang kominfo	2	42 <sup>k)</sup>			
			Jumlah SDM Kominfo yang bersertifikasi	80	4980 <sup>k)</sup>			
3.9	Koordinasi <i>Media Center</i> dan kehumasan	Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan <i>Media Center</i> dan Kehumasan	Jumlah Rapat Koordinasi penguatan <i>Media Center</i> dan Kehumasan	12	60 <sup>k)</sup>	Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	KEMENKO POLHUKAM	3,4
			Jumlah Rapat Koordinasi KIP	12	60 <sup>k)</sup>			
			Jumlah pemantauan dan evaluasi	4	20 <sup>k)</sup>			
<b>T O T A L</b>								<b>2.245,7</b>

**Keterangan:**

<sup>a)</sup> Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2007

<sup>k)</sup> Aneka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

<sup>1)</sup> Total alokasi untuk Kemenkominfo adalah periode 2011-2014 karena adanya pengelompokan ulang direktorat dan direktorat jenderal sehingga kegiatan-kegiatan di tahun 2010 tidak dapat dipetakan satu-satu dengan kegiatan-kegiatan di 2011-2014

**RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG  
POLITIK LUAR NEGERI**

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK LUAR NEGERI

PRIORITAS SUB BIDANG : PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1	Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia Dalam ASEAN Khususnya Dalam Implementasi Piagam ASEAN dan Pembentukan Komunitas ASEAN 2015	Meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan Komunitas ASEAN di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.	1. % prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diadopsi 2. % dukungan dan partisipasi masyarakat domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN 2015	80%	80%			105,1
1.1	Kerjasama ASEAN bidang Politik dan Keamanan	Terlaksananya peran Indonesia dalam mewujudkan komunitas ASEAN di bidang Politik dan Keamanan	1. Jumlah pertemuan/kegiatan/seminar/sidang yang diikuti oleh Indonesia 2. Terlaksananya grand design nasional pelaksanaan Cetak Biru Politik-Keamanan ASEAN 3. Jumlah provinsi/wilayah daerah yang telah memperoleh sosialisasi tentang Cetak Biru ASEAN bidang Politik dan Keamanan	68	350 <sup>KI</sup> 80% terlaksana	Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN	Kemenlu	43,9

**SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK LUAR NEGERI**  
**PRIORITAS SUB BIDANG : PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL**

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			4. Jumlah pelaksanaan kegiatan terkait dengan dukungan RI kepada Timor Leste dalam upaya menjadi anggota ASEAN.	10	38 <sup>KI</sup>			
			5. Jumlah kegiatan terkait pelaksanaan Pertemuan Resmi ASEAN dan Persiapan Indonesia menjadi Ketua ASEAN pada 2013.	2	11 <sup>KI</sup>			
1.2	Kerjasama ASEAN bidang Ekonomi	Terlaksananya peran Indonesia dalam mewujudkan komunitas ASEAN di bidang ekonomi dengan karakteristik utama pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global	1. % partisipasi Indonesia dalam pertemuan/kegiatan/seminar/sidang  2. % partisipasi dalam upaya menjaga sentralitas ASEAN dalam hubungan ekonomi dengan mitra wicara (sidang dengan mitra wicara)	100 % keikutsertaan dalam sidang, dan 76 kertas posisi	100 % keikutsertaan dalam sidang,dan 407 kertas posisi <sup>KI</sup>	Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN	Kemenlu	21,7
			3. Jumlah kegiatan dalam rangka meningkatkan pemahaman publik mengenai integrasi ekonomi ASEAN	8 kegiatan, di Pulau Jawa	40 kegiatan di <sup>KI</sup> Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua			

**SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK LUAR NEGERI**  
**PRIORITAS SUB BIDANG : PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL**

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1.3	Kerjasama ASEAN bidang Fungsional	Terlaksananya peran Indonesia dalam mewujudkan komunitas ASEAN di bidang Sosial Budaya	<p>1. Jumlah pertemuan/kegiatan/seminar/sidang yang diikuti oleh Indonesia</p> <p>2. Jumlah pertemuan koordinasi kerjasama Fungsional/Sosial-Budaya ASEAN dalam rangka ASEAN Senior Official Committee mengenai ASCC di luar negeri</p> <p>3. Jumlah rapat koordinasi teknis dengan instansi teknis terkait dalam rangka persiapan sidang terkait kebijakan politik luar negeri</p> <p>4. Jumlah kegiatan sosialisasi perkembangan isu-isu di bidang Sosial-Budaya dalam kerangka ASEAN kepada masyarakat</p> <p>5. % provinsi yang telah memperoleh sosialisasi mengenai Cetak Biru Sosial-Budaya ASEAN kepada masyarakat dan guru SMP/SMA</p>	<p>38</p> <p>2</p> <p>4</p> <p>5 kali kegiatan sosialisasi dan 1 kali event internasional</p> <p>20% (7 propinsi dari 33 propinsi)</p>	<p>195<sup>ki</sup></p> <p>11<sup>ki</sup></p> <p>22<sup>ki</sup></p> <p>22 kali kegiatan sosialisasi dan 7 kali event internasional</p> <p>100% (33 provinsi)<sup>ki</sup></p>	Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN	Kemenlu	22,0

**SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK LUAR NEGERI**  
**PRIORITAS SUB BIDANG : PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL**

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1.4	Kerjasama ASEAN dengan Mitra Wicara dan Antar Kawasan	Terlaksananya peran Indonesia dalam mewujudkan Kawasan ASEAN yang Dinamis dan Outward-Looking (kerjasama ASEAN-Australia, China, Canada, Uni Eropa, India, Jepang, Selandia Baru, Republik Korea, Rusia, Amerika Serikat, ASEAN+3, negara-negara East Asia Summit, PBB, Gulf Cooperation Council, MERCOSUR, dan Pakistan)	1. Jumlah pertemuan/sidang dalam rangka implementasi kesepakatan kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial budaya	60	300 <sup>KI</sup>	Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN	Kemenlu	14,6
			2. Jumlah kegiatan dalam rangka meningkatkan pemahaman publik mengenai hubungan ASEAN dengan Mitra Wicara serta perkembangan dan tindak lanjut implementasi <i>Plan of Action</i> kerjasama ASEAN dengan Mitra Wicara	4	22 <sup>KI</sup>			
1.5	Kegiatan Koordinasi Kerjasama ASEAN	Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Kerjasama ASEAN	1. Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan cetak biru Komunitas ASEAN dan kerjasama ASEAN	12	60 <sup>KI</sup>	Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Kemenko Polhukam	2,8
			2. Jumlah pemantauan dan evaluasi	4	20 <sup>KI</sup>			
2	Peningkatan Peran Indonesia Dalam Menjaga Keamanan Nasional dan Menciptakan Perdamaian Dunia (*)	Meningkatnya peran Indonesia untuk turut menjaga keamanan nasional dan perdamaian dunia melalui pendekatan multilateralisme	Tingkat keberhasilan rekomendasi/ gagasan Pemri yang diterima dalam sidang kerjasama terkait penanganan isu-isu multilateral dan kemajuan kerjasama multilateral	70%	70%			26,3

**SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK LUAR NEGERI**  
**PRIORITAS SUB BIDANG : PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL**

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
2.1	Kerjasama Multilateral terkait Isu Keamanan Internasional, Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional, Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Terorisme	Terlaksananya partisipasi Indonesia dalam forum kerja sama multilateral	1. Jumlah prakarsa Indonesia untuk mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB. 2. Jumlah posisi pemri yang disampaikan dalam sidang internasional 3. Jumlah koordinasi teknis 4. Jumlah partisipasi Indonesia pada sidang internasional 5. Jumlah penyelenggaraan pertemuan internasional (Indonesia sebagai tuan rumah)	4 10 19 7 -	20 <sup>KI</sup> 50 <sup>KI</sup> 119 <sup>KI</sup> 35 <sup>KI</sup> 3 <sup>KI</sup>	Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral	Kemenlu	20,6
2.2	Kegiatan Koordinasi Strategi Politik Luar Negeri	Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Strategi Politik Luar Negeri	1. Jumlah Rapat Koordinasi peningkatan kualitas Strategi Politik Luar Negeri 2. Jumlah pemantauan dan evaluasi	12 4	60 <sup>KI</sup> 20 <sup>KI</sup>	Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Kemenko Polhukam	2,8
2.3	Kegiatan Koordinasi Hubungan Multilateral	Terselenggaranya koordinasi Kebijakan Hubungan Multilateral	1. Jumlah Rapat Koordinasi peningkatan kualitas hubungan multilateral 2. Jumlah pemantauan dan evaluasi	12 4	60 <sup>KI</sup> 20 <sup>KI</sup>	Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Kemenko Polhukam	2,8
3	Pelaksanaan Diplomasi Perbatasan yang Terkoordinasi untuk Menjaga Keutuhan Wilayah Darat, Laut, dan Udara Indonesia serta Menjaga Kekayaan Sumber Daya Alam Nasional	Meningkatnya kinerja diplomasi perbatasan	% persoalan yang diselesaikan dalam setiap perundingan perbatasan	20%	100%			84,8

**SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK LUAR NEGERI**  
**PRIORITAS SUB BIDANG : PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL**

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
3.1	Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan	Terseleenggaranya penguatan diplomasi melalui optimalisasi perjanjian politik, keamanan, kewilayahan dan kelautan	1. Jumlah telaahan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri 2. Jumlah telaahan terhadap persoalan-persoalan hukum internasional 3. Jumlah pelaksanaan ratifikasi, penerapan hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan perjanjian internasional 4. Jumlah standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi pembuatan perjanjian internasional 5. Jumlah pelaksanaan perundingan yang terkait dengan pembuatan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral antara RI-Malaysia, Filipina, Singapura, Timor Leste, Vietnam, dan Palau 6. Tersusunnya dokumen tentang Ocean Policy	14 13 6 49 12	70 <sup>KI</sup> 65 <sup>KI</sup> 30 <sup>KI</sup> 245 <sup>KI</sup> 60 <sup>KI</sup>	Program Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	Kemenlu	64,2

**SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK LUAR NEGERI**  
**PRIORITAS SUB BIDANG : PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL**

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
3.2	Kegiatan Koordinasi Wilayah Negara dan Tata Ruang Pertahanan	Terseleenggaranya Koordinasi Kebijakan Wilayah Negara dan Tata Ruang Pertahanan	1. Jumlah Rapat Koordinasi Wilayah Negara dan Tata Ruang Pertahanan 2. Jumlah rapat koordinasi pembentukan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan 3. Jumlah koordinasi pemetaan batas wilayah RI dengan Malaysia, PNG, Timor Leste, Singapura dan Palau 4. Jumlah pemantauan dan evaluasi 5. Jumlah rapat koordinasi Desk Wiltas dan PPKT 6. Jumlah pemantauan perkembangan sosial politik di Wiltas dan PPKT	12	60 <sup>KI</sup>	Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Kemenko Polhukam	20,6
4	Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri	Terlindunginya kepentingan nasional dan meningkatnya upaya perlindungan WNI/BHI di luar negeri	Tingkat pelayanan perlindungan WNI/BHI yang memadai dan tepat waktu	100%	100%			1.120,3

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK LUAR NEGERI  
 PRIORITAS SUB BIDANG : PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
4.1	Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri	Terlaksananya pelayanan dan perlindungan WNI/BHI	1. Jumlah pertemuan dengan negara sahabat terkait perlindungan WNI/BHI dengan negara lain 2. Jumlah Citizen Services yang diperkuat 3. Jumlah WNI/TKI yang memperoleh fasilitas di penampungan 4. Jumlah WNI/TKI yang direpatriasi 5. Jumlah WNI/TKI yang dideportasi 6. % pemberian bantuan hukum (advokasi dan lawyer) bagi WNI terutama tenaga kerja wanita 7. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelayanan dan perlindungan WNI/TKI 8. Jumlah sosialisasi untuk PJTKI tentang pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri 9. Jumlah koordinasi dengan instansi terkait baik di dalam maupun di luar negeri 10. Tersedianya <i>database</i> mengenai penyebaran WNI terdaftar di seluruh perwakilan di luar negeri	5 24 - - - - - 3 65 Database WNI/BHI di seluruh perwakilan	35 120 14998 14998 24020 100% 96 15 390 Database WNI/BHI di seluruh perwakilan	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran	Kemenlu	1.120,3

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK LUAR NEGERI  
 PRIORITAS SUB BIDANG : PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			11. Jumlah buku saku/leaflet tentang informasi pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri	1	9 <sup>KI</sup>			
			12. Jumlah kota yang menjadi program diseminasi perlindungan WNI melalui media elektronik	15	125 <sup>KI</sup>			
			13. Jumlah tayangan iklan tentang pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri	6	76 <sup>KI</sup>			
5	Peningkatan Peran Indonesia Dalam Pemajuan Demokrasi, HAM, Lingkungan Hidup, dan Perlindungan Budaya (**)	Meningkatnya citra Indonesia di dunia internasional dalam pemajuan demokrasi, HAM, lingkungan hidup, dan perlindungan budaya	1. Tingkat persepsi positif masyarakat internasional terhadap Indonesia 2. Tingkat keberhasilan rekomendasi/gagasan Pemri yang diterima dalam sidang terkait penanganan isu-isu HAM, lingkungan hidup, dan perlindungan budaya	Baik 70%	Baik 70%			182,2
5.1	Penguatan Citra Indonesia Melalui Diplomasi Publik	Terselenggaranya kegiatan pemberian dukungan publik di dalam dan luar negeri bagi pelaksanaan politik luar negeri RI	1. Jumlah koordinasi dalam rangka meningkatkan kualitas diplomasi publik 2. Tingkat penyelesaian legal matters Museum KAA 3. Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam rangka diplomasi publik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri khususnya terkait isu demokrasi, interfaith dialogue, global media dialogue, dan cultural exchange	3 kali Updates from the Regions 50 % Penyelesaian Legal Matters MKAA Bandung 21	22 kali Updates from the Regions <sup>KI</sup> 100 % Penyelesaian Legal Matters MKAA Bandung 120 <sup>KI</sup>	Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	Kemenlu	115,9

**SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK LUAR NEGERI**  
**PRIORITAS SUB BIDANG : PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL**

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			4. Jumlah penyelenggaraan pertemuan internasional di bidang diplomasi publik	1 kali penyelenggaraan BDF (3 rangkaian kegiatan Bali Democracy Forum : workshop, BDF EGPM, BDF , operasionalisasi Sekretariat IDP, Publikasi)	5 kali penyelenggaraan BDF(48 rangkaian kegiatan Bali Democracy Forum : workshop, BDF EGPM, BDF, operasionalisasi Sekretariat IDP, Publikasi)			
			5. Jumlah diseminasi informasi mengenai kebijakan luar negeri dan pelaksanaan tugas Kemenlu dan Perwakilan RI di luar negeri kepada publik dalam dan luar negeri.	20	117			
			6. Jumlah Promosi dan Community Outreach Museum KAA	8	40			
			7. Revitalisasi Museum KAA (tergantung dari penyelesaian legal matters MKAA)	100 % Revitalisasi Museum KAA	100 % Revitalisasi Museum KAA			
5.2	Kerjasama Multilateral Dalam Rangka Pemajuan dan Perlindungan HAM serta Penanganan Isu Kemanusiaan	Terlaksananya partisipasi Indonesia dalam forum kerja sama multilateral tentang pemajuan dan perlindungan HAM serta penanganan isu kemanusiaan termasuk penanganan isu residual Timor-Timur, dan penanganan isu kemanusiaan pada tingkat nasional	1. Jumlah koordinasi teknis	28	196	Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di bidang Multilateral	Kemenlu	40,0
		2. Jumlah penyelenggaraan pertemuan/kerjasama internasional	12	60				
		3. Jumlah partisipasi Indonesia pada sidang internasional	4	226				
		4. Jumlah posisi Pemri yang disampaikan dalam sidang internasional	5	227				
5.3	Kerjasama Multilateral Terkait Isu Pembangunan Ekonomi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya partisipasi Indonesia dalam setiap forum kerja sama multilateral tentang pembangunan ekonomi, keuangan,	1. Jumlah Posisi pemri yang disampaikan dalam sidang internasional	8	40	Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral	Kemenlu	26,3
		2. Jumlah koordinasi teknis	52	260				

**SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK LUAR NEGERI**  
**PRIORITAS SUB BIDANG : PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL**

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			3. Jumlah penyelenggaraan pertemuan/kerjasama internasional	2	6 <sup>K1</sup>			
			4. Jumlah partisipasi Indonesia dalam sidang regional dan multilateral	27	135 <sup>K1</sup>			
6	Pemantapan Kemitraan Strategis di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta Kawasan Amerika dan Eropa	Terwujudnya perluasan akses dan meningkatnya kerjasama bilateral dan regional di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, budaya dan pariwisata, serta pembangunan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika serta kawasan Amerika dan Eropa	1. % prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diadopsi	70%	70%			202,4
			2. Tingkat kelancaran hubungan dan kerjasama bilateral di berbagai bidang.	80%	80%			
6.1	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik	Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik	1. % fasilitasi penyelenggaraan kerjasama	100%	100%	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Kemenu	27,8
			2. Jumlah dokumen implementasi kesepakatan	15	82 <sup>K1</sup>			
			3. Jumlah kunjungan/pernyataan dukungan Kepala Negara/Pemerintahan dan Pejabat Tinggi dari/ke negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik	4	51 <sup>K1</sup>			
			4. Jumlah rekomendasi/prakarsa Indonesia dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan Asia Timur dan Pasifik	5	14 <sup>K1</sup>			

**SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK LUAR NEGERI**  
**PRIORITAS SUB BIDANG : PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL**

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			5. % fasilitasi untuk sidang/pameran/forum bisnis ( <i>Trade, Tourism and Investment</i> )	100%	100%			
			6. Tingkat penanganan isu <i>illegal migrant</i> dan <i>human trafficking</i> serta isu-isu lainnya	25%	25%			
			7. Jumlah pelaksanaan koordinasi teknis	30	200 <sup>KI</sup>			
6.2	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Tengah	Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah	1. % fasilitasi penyelenggaraan kerjasama 2. Jumlah dokumen implementasi kesepakatan 3. Jumlah kunjungan/pernyataan dukungan Kepala Negara/Pemerintahan dan Pejabat Tinggi dari/ke negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah 4. Jumlah rekomendasi/prakarsa Indonesia dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan Asia Selatan dan Tengah 5. % fasilitasi untuk sidang/pameran/forum bisnis ( <i>Trade, Tourism and Investment</i> ) 6. Tingkat penanganan isu <i>illegal migrant</i> dan <i>human trafficking</i> serta isu-isu lainnya 7. Jumlah koordinasi teknis	100% 8 8 2 100% 25% 30	100% 52 <sup>KI</sup> 46 <sup>KI</sup> 16 <sup>KI</sup> 100% 25% 200 <sup>KI</sup>	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Kemenlu	18,8

**SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK LUAR NEGERI**  
**PRIORITAS SUB BIDANG : PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL**

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
6.3	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Sub Sahara Afrika	Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Sub Sahara Afrika	1. % fasilitasi penyelenggaraan kerjasama 2. Jumlah dokumen implementasi kesepakatan 3. Jumlah kunjungan/pernyataan dukungan Kepala Negara/Pemerintahan dan Pejabat Tinggi dari negara-negara di kawasan Sub Sahara Afrika dan pernyataan dukungan resmi dari negara-negara kawasan Sub Sahara Afrika terhadap NKRI 4. Jumlah rekomendasi/prakarsa Indonesia dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan Sub Sahara Afrika 5. % fasilitasi untuk sidang/pameran/forum bisnis ( <i>Trade, Tourism and Investment</i> ) 6. Jumlah koordinasi teknis	100% 3 17 4 100% 30	100% 24 <sup>KI</sup> 92 <sup>KI</sup> 24 <sup>KI</sup> 100% 200 <sup>KI</sup>	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Kemenlu	22,4
6.4	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Timur Tengah	Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah	1. % fasilitasi penyelenggaraan kerjasama 2. Jumlah dokumen implementasi kesepakatan 3. Jumlah kunjungan/pernyataan dukungan Kepala Negara/Pemerintahan dan Pejabat Tinggi dari negara-negara di kawasan Timur Tengah dan pernyataan dukungan resmi dari negara-negara kawasan Timur Tengah terhadap NKRI	100% 8 12	100% 52 <sup>KI</sup> 63 <sup>KI</sup>	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Kemenlu	18,4

**SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK LUAR NEGERI**  
**PRIORITAS SUB BIDANG : PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL**

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			4. Jumlah rekomendasi/prakarsa Indonesia dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah (Palestina, Irak, Lebanon dan Sudan)	6	38 <sup>KI</sup>			
			5. % fasilitasi untuk sidang/pameran/forum bisnis (Trade, Tourism and Investment )	100%	100%			
			6. Jumlah koordinasi teknis	30	200 <sup>KI</sup>			
6.5	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya di berbagai forum Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (APEC, ARF, ACD, NAAASP, AMED, SwPD, PIF, IOR-ARC, CTI, BIMP-EAGA, IMT-GT, dll)	1. Jumlah partisipasi Indonesia pada sidang/pertemuan	68	372 <sup>KI</sup>	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Kemenlu	41,0
			2. Tingkat penyampaian posisi Delri dalam mencegah pencantuman isu separatisme di Indonesia dalam dokumen akhir sidang	100%	100%			
			3. Jumlah dokumen implementasi kesepakatan	8	48 <sup>KI</sup>			
			4. Jumlah penyelenggaraan sidang/sosialisasi/seminar mengenai kebijakan luar negeri RI	10	60 <sup>KI</sup>			
			5. Jumlah prakarsa/inisiatif/rekomendasi Indonesia yang diterima	11	61 <sup>KI</sup>			
			6. Jumlah koordinasi teknis	40	270 <sup>KI</sup>			
6.6	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Amerika Utara dan Tengah	Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di Kawasan Amerika Utara dan Tengah	1. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di Indonesia	12	74 <sup>KI</sup>	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	Kemenlu	11,6
			2. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di negara-negara kawasan Amerika Utara dan Tengah	19	99 <sup>KI</sup>			
			3. Jumlah kunjungan pejabat tinggi dan senior dari/ke negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Tengah	6	40 <sup>KI</sup>			
			4. Jumlah dokumen implementasi kesepakatan	15	89 <sup>KI</sup>			

**SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK LUAR NEGERI**  
**PRIORITAS SUB BIDANG : PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL**

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			5. % fasilitasi untuk pameran/forum bisnis di bidang ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata	100%	100%			
			6. Jumlah koordinasi teknis (interdep)	90	482 <sup>KI</sup>			
			7. Jumlah keikutsertaan dalam pameran dan kegiatan kebudayaan di negara-negara Amerika Utara dan Tengah	-	32 <sup>KI</sup>			
6.7	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Amerika Selatan dan Karibia	Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia	1. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di Indonesia	4	16 <sup>KI</sup>	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	Kemenlu	10,9
			2. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di negara-negara kawasan Amerika Selatan dan Karibia	6	32 <sup>KI</sup>			
			3. Jumlah kunjungan pejabat tinggi dari/ke negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia	5	31 <sup>KI</sup>			
			4. Jumlah dokumen implementasi kesepakatan	11	59 <sup>KI</sup>			
			5. % fasilitasi untuk pameran/forum bisnis di bidang ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata	100%	100%			
			6. Jumlah koordinasi teknis (interdep)	30	144 <sup>KI</sup>			
			7. Jumlah keikutsertaan dalam pameran dan kegiatan kebudayaan di negara-negara Amerika Selatan dan Karibia	1	25 <sup>KI</sup>			

**SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK LUAR NEGERI**  
**PRIORITAS SUB BIDANG : PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL**

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
6.8	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Barat	Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Eropa Barat	1. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di Indonesia 2. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di negara-negara kawasan Eropa Barat 3. Jumlah kunjungan tingkat pejabat tinggi dari/ke negara-negara di kawasan Eropa Barat 4. Jumlah dokumen implementasi kesepakatan 5. % fasilitasi untuk pameran/forum bisnis di bidang ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata 6. Jumlah koordinasi teknis (interdep) 7. Jumlah keikutsertaan dalam pameran dan kegiatan kebudayaan di negara-negara Eropa Barat	8 7 10 9 100% 35 2	42 <sup>KI</sup> 42 <sup>KI</sup> 55 <sup>KI</sup> 48 <sup>KI</sup> 100% 187 <sup>KI</sup> 26 <sup>KI</sup>	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	Kemenlu	10,9
6.9	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Tengah dan Timur	Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di Kawasan Eropa Tengah dan Timur	1. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di Indonesia 2. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di negara-negara kawasan Eropa Tengah dan Timur 3. Jumlah kunjungan tingkat pejabat tinggi dari/ke negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur 4. Jumlah dokumen implementasi kesepakatan 5. % fasilitasi untuk pameran/forum bisnis di bidang ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata 6. Jumlah koordinasi teknis (interdep)	5 5 2 10 100% 25	30 <sup>KI</sup> 33 <sup>KI</sup> 13 <sup>KI</sup> 61 <sup>KI</sup> 100% 137 <sup>KI</sup>	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	Kemenlu	10,7
6.10	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama Intrakawasan Amerika dan Eropa	Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya di Organisasi Intrakawasan Amerika dan Eropa	1. Jumlah kerjasama yang disepakati antara RI melalui kerjasama intrakawasan Amerika dan Eropa 2. Jumlah prakarsa/rekomendasi Indonesia dalam kerjasama FEALAC	11 6	64 <sup>KI</sup> 34 <sup>KI</sup>	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerop	Kemenlu	24,4

**SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK LUAR NEGERI**  
**PRIORITAS SUB BIDANG : PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL**

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			3. Jumlah prakarsa/rekomendasi Indonesia dalam kerjasama ASEM	4	20 <sup>KI</sup>			
			4. Jumlah penyelenggaraan sidang/pertemuan dalam rangka optimalisasi diplomasi intrakawasan Amerika dan Eropa	12	65 <sup>KI</sup>			
			5. Jumlah sidang/pertemuan yang dihadiri dalam rangka optimalisasi diplomasi intrakawasan Amerika dan Eropa	37	195 <sup>KI</sup>			
			6. % fasilitasi untuk pameran/forum bisnis di bidang ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata dalam kerjasama intra kawasan	100%	100%			
			7. Jumlah koordinasi teknis (interdep)	30	165 <sup>KI</sup>			
			8. Jumlah keikutsertaan dalam pameran dan kegiatan kebudayaan di kawasan Amerika dan Eropa	2	12 <sup>KI</sup>			
6.11	Kegiatan Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika	Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika	1. Jumlah Rapat Koordinasi peningkatan kualitas kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika	12	60 <sup>KI</sup>	<b>Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</b>	Kemenko Polhukam	2,8
			2. Jumlah pemantauan dan evaluasi	4	20 <sup>KI</sup>			

**SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK LUAR NEGERI**  
**PRIORITAS SUB BIDANG : PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL**

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
6.12	Kegiatan Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa	Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Kerjasama Amerika dan Eropa	1. Jumlah Rapat Koordinasi peningkatan kualitas kerjasama Amerika dan Eropa 2. Jumlah pemantauan dan evaluasi	12 4	60 <sup>K)</sup> 20 <sup>K)</sup>	Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Kemenko Polhukam	2,8
7	Peningkatan Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi (***)	Terwujudnya perluasan akses dan meningkatkannya kerjasama multilateral di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, budaya dan pariwisata, serta pembangunan	Tingkat keberhasilan rekomendasi/gagasan Pemri yang diterima dalam sidang terkait isu ekonomi, perdagangan, investasi, budaya dan pariwisata, serta pembangunan	70%	70%			22,8
7.1	Kerjasama Multilateral Terkait Isu Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HAKI	Terlaksananya partisipasi Indonesia dalam setiap forum kerja sama multilateral tentang Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HAKI	1. Jumlah posisi Pemri yang disampaikan dalam sidang internasional 2. Jumlah koordinasi teknis 3. Jumlah penyelenggaraan pertemuan/kerjasama internasional 4. Jumlah partisipasi Indonesia dalam sidang internasional	17 21 2 10	107 <sup>K)</sup> 109 <sup>K)</sup> 10 <sup>K)</sup> 60 <sup>K)</sup>	Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral	Kemenlu	22,8
8	Peningkatan Peran Serta Indonesia Dalam Kerjasama Selatan-Selatan	Meningkatnya dukungan bagi Indonesia dari negara-negara di kawasan Selatan	Tingkat persepsi positif Negara-negara di kawasan Selatan terhadap Indonesia	Baik	Baik			64,7

**SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK LUAR NEGERI**  
**PRIORITAS SUB BIDANG : PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL**

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
8.1	Penguatan Citra Indonesia Melalui Kerjasama Teknik	Terlaksananya kebijakan di bidang kerjasama teknik yang berkualitas	1. Jumlah koordinasi dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerjasama teknik	-	28 <sup>KI</sup>	Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	Kemenlu	32,0
			2. Jumlah pelaksanaan kegiatan kerjasama teknis di berbagai bidang dengan negara-negara sahabat.	2	10 <sup>KI</sup>			
			3. Jumlah pelaksanaan kegiatan kerjasama teknik yang diberikan Indonesia dalam rangka kerjasama Selatan-Selatan	7	27 <sup>KI</sup>			
			4. % Penguatan entitas untuk melakukan koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam melaksanakan kerjasama Selatan-Selatan	100%	100%			
8.2	Kerjasama Multilateral Terkait Isu Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang	Terlaksananya partisipasi Indonesia dalam setiap forum kerja sama multilateral tentang sosial budaya dan organisasi internasional negara berkembang	1. Jumlah posisi Pemri yang disampaikan dalam sidang internasional	22	107 <sup>KI</sup>	Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral	Kemenlu	32,7
			2. Jumlah koordinasi teknis	16	80 <sup>KI</sup>			
			3. Jumlah penyelenggaraan pertemuan/kerjasama internasional	-	2 <sup>KI</sup>			
			4. Jumlah partisipasi Indonesia dalam sidang internasional	23	133 <sup>KI</sup>			
			5. Jumlah pertemuan tentang LSM Asing	20	106 <sup>KI</sup>			
			6. Tersusunnya grand design kerjasama Selatan-Selatan		Tersusunnya grand design kerjasama kerjasama Selatan-Selatan			
<b>TOTAL</b>								<b>1.808,6</b>

**SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK LUAR NEGERI**  
**PRIORITAS SUB BIDANG : PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL**

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			

Keterangan :

(\*) Di dalam fokus Peningkatan Peran Indonesia Dalam Menjaga Keamanan Nasional dan Menciptakan Perdamaian Dunia juga terdapat :

1. Kegiatan *Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Timur Tengah* program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang juga terdapat pada fokus Pemantapan Kemitraan Strategis di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta Kawasan Amerika dan Eropa
2. Kegiatan *Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan* program Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional yang juga terdapat pada fokus Pelaksanaan Diplomasi Perbatasan yang Terkoordinasi untuk Menjaga Keutuhan Wilayah Darat, Laut, dan Udara Indonesia serta Menjaga Kekayaan Sumber Daya Alam Nasional
3. Kegiatan *Kerjasama Multilateral Terkait Isu Pembangunan Ekonomi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup* program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral pada fokus Peningkatan Peran Indonesia Dalam Pemajuan Demokrasi, HAM, Lingkungan Hidup, dan Perlindungan Budaya
4. Kegiatan *Kerjasama Multilateral Terkait Isu Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HAK* program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral yang juga terdapat pada fokus Peningkatan Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi
5. Kegiatan *Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik* program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang juga terdapat pada fokus Pemantapan Kemitraan Strategis di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta Kawasan Amerika dan Eropa
6. Kegiatan *Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Tengah* program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang juga terdapat pada fokus Pemantapan Kemitraan Strategis di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta Kawasan Amerika dan Eropa
7. Kegiatan *Penguatan Citra Indonesia Melalui Diplomasi Publik* program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik yang juga terdapat pada fokus Peningkatan Peran Indonesia dalam Pemajuan Demokrasi, HAM, Lingkungan Hidup, dan Perlindungan Budaya

(\*\*) Di dalam fokus Peningkatan Peran Indonesia Dalam Pemajuan Demokrasi, HAM, Lingkungan Hidup, dan Perlindungan Budaya juga terdapat :

1. Kegiatan *Kerjasama Multilateral Terkait Isu Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HAK* program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral yang juga terdapat pada fokus Peningkatan Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi

(\*\*\*) Di dalam fokus Pelaksanaan Peningkatan Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi juga terdapat :

1. Kegiatan *Kerjasama Multilateral Terkait Isu Pembangunan Ekonomi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup* program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral pada fokus Peningkatan Peran Indonesia Dalam Pemajuan Demokrasi, HAM, Lingkungan Hidup, dan Perlindungan Budaya
2. Kegiatan *Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika* program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang juga terdapat pada fokus Pemantapan Kemitraan Strategis di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta Kawasan Amerika dan Eropa

<sup>k)</sup> Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)